

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Almasdi Syahza. 2021. *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*. Unri Press. Pekanbaru.
- Arba. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Radjawali Press, Jakarta.
- Aris Prio Agus Santoso, *Et Al.* 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pustaka Baru Press. Surakarta.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. 2026. *Kabupaten Agam Dalam Angka 2026*. BPS Kabupaten Agam. Agam.
- Budi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Cetakan Ke-10*. Djambatan. Jakarta.
- Elza Syarief. 2013. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Kompas. Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Sigit Sapto Nugroho, Mohamad Tohari dan Mudji Rahardjo. 2017. *Hukum Agraria Indonesia*. Pustaka Iltizam. Solo.

- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Riset*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sukino. 2024. *Peralihan Hak Guna Usaha, Hak Adat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria*. Eureka Media Aksara. Purbalingga.
- Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia. Jogjakarta.

B. Jurnal

- Annisa Sephia Jannah, *Et. Al.*, 2025, “Tanggung Jawab Administratif Pemerintha Daerah dalam Pengawasan Izin Lingkungan”, *Constituio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*”, Vol. 4, No 1.
- Dewi Asimah dan Anna Erliyana. 2025. “The Concept and Legal Protection Regarding Government Administrative Actions in the Form of Not Performing Concrete Actions (Omission)”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 13, No. 3.
- Khurul Anam, *Et. Al.* 2024. “Asas Keadilan dalam Undang-Undang Pokok Agraria: Perspektif Hukum Islam dalam Pengelolaan Tanah”. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*. Vol. 11, No. 2.
- Tamarine Camalia dan Taupiqurrahman. 2021. “Status Tanah Ulayat atas Hak Guna Usaha yang telah Berakhir (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021)”. *Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6, No. 2.
- Zahratul Muna, Sulaiman, dan Arif Rahman. 2024. “Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

(Studi Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. 7, No. 3.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

D. Artikel Online/Website

Admin. 2025. “Validasi Lahan Eks PT. Inang Sari di Kabupaten Agam Picu Polemik”. Validasi Lahan Eks PT. Inang Sari di Kabupaten Agam Picu Polemik - rakyatsumbar.id.

- Annisa Fianni Sisma. 2023. “7 Asas Hukum Agraria di UUPA”. 7 Asas Hukum Agraria di UUPA - Istilah Ekonomi Katadata.co.id.
- Brilliant Ayang Iswenda. 2025. “Simak Kasus Konflik Agraria Indonesia Sepanjang 2024”. Simak Kasus Konflik Agraria Indonesia Sepanjang 2024 - GoodStats.
- Budiawan Sidik A. dan Zikrina Ratri. 2025. “Potensi Konflik Agraria yang Terus Berlanjut di Indonesia”. Potensi Konflik Agraria yang Terus Berlanjut di Indonesia.
- Detikfinance. 2025. BPN Catat 3.260 Kasus Sengketa hingga Konflik Pertanahan hingga September 2025. BPN Catat 3.260 Kasus Sengketa hingga Konflik Pertanahan hingga September 2025.
- Hukum Properti.com. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Regulasi Hukum Properti.
- Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia. 2025. KPA: Konflik Agraria di Indonesia Naik. KPA: Konflik Agraria di Indonesia Naik | SIEJ - Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia.
- Muh. Aidil Akbar. 2025. “Hak Guna Usaha (HGU) Menurut Hukum”. Hak Guna Usaha (HGU) Menurut Hukum - ILS Law Firm.
- Yudi Setyo Prayogo. 2025. “Kewenangan Pertanahan Berubah Total! Ini 5 Perbedaan Penting Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2025 yang Harus Diketahui”. Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2025: Kewenangan Pertanahan Berubah Total, Ini 5 Perbedaan Pentingnya!.

E. Tesis/Skripsi/Disertasi

Dian Agustia. 2013. *“Penanganan Sengketa Tanah Hak Guna Usaha (Studi pada PT. Sarana Mandiri Mukti di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)”*. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

